

BENEFIT INCIDENCE ANALYSIS PROGRAM BIDIKMISI DI UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nur Innayah¹ Fitri Arianti²

^{1,2}Departemen IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro
nurinnayah@students.undip.ac.id

Abstract

Tujuan: *One of the ways to improve the quality of human resources is by providing educational assistance programs for students who wish to continue their education to higher education. Bidikmisi is one of the scholarship programs provided by the government in helping prospective students, especially those who are less fortunate, to pursue higher education.*

Metode: *This study focuses on analyzing the impact of the application of the Bidikmisi scholarship using the Benefit Incidence Analysis (BIA) method. The data used in this study are primary data. Data was collected using a survey method through questionnaires distributed to Bidikmisi students who were the sample. The sample used is Bidikmisi students with active status at Diponegoro University from class 2017, 2018 and 2019.*

Hasil: *The results of this study indicate that the Bidikmisi program at Diponegoro University is a progressive policy. The university as the organizer of the bidikmisi program is considered appropriate in providing the obligations of bidikmisi recipients to bidikmisi students at Diponegoro University. The group of students with the lowest level of parental income gets a 33 percent distribution of benefits from the Bidikmisi program funds.*

Originalitas: *The concentration curve lies above the 45 degree diagonal line, so the 10 percent of students with the lowest income level (first quintile) in the population receive more than 10 percent of the benefits of the subsidy so that the distribution of benefits can be said to be progressive in absolute terms.*

Keywords: *Bidikmisi Program, Benefit Incidence Analysis, Income Group, Progressivity*

PENDAHULUAN.

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat di pendidikan tinggi, khususnya bagi masyarakat menengah kebawah pada tahun 2010 pemerintah meluncurkan Program “Bidikmisi” melalui Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti) , Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Program Bidikmisi adalah salah satu dari program 100 hari kerja Menteri Pendidikan Nasional. Program Bidikmisi ini bukanlah seperti beasiswa kebanyakan lainnya, program ini merupakan bantuan pendidikan yang ditujukan kepada calon mahasiswa yang tidak mampu secara finansial namun memiliki potensi akademik yang memadai.

Dari sekian banyak Universitas yang menjadi penyelenggara Program Bidikmisi, Peneliti memfokuskan penelitian pada Universitas Diponegoro yang telah menjadi penyelenggara semenjak program ini pertama kali diluncurkan pada tahun 2010 sampai dengan sekarang. Universitas Diponegoro dituntut mengelola bidikmisi dengan pedoman penyelenggaraan Bidikmisi yaitu, 3T (Tepat Sasaran, Tepat Waktu, dan Tepat Jumlah) untuk mencapai tujuan Bidikmisi. Pada tahun 2019 realisasi penerima bidikmisi di Universitas Diponegoro mencapai 1125 mahasiswa.

Mengutip dari Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Belmawa 2018 bahwa Perguruan Tinggi hendaknya dapat melakukan verifikasi secara lebih seksama sehingga mengurangi kemungkinan tidak tepat sasaran (Kemenristekdikti, 2018). Menurut Yusuf & Roziqin (2018) sesuai dengan hasil evaluasi laporan tahunan Ditjen Belmawa tahun 2015 menunjukkan permasalahan yaitu: pengawasan yang kurang dalam penyaluran sehingga membuat penerima Bidikmisi kurang tepat sasaran. Penulis melakukan prasarvei guna memperkuat dugaan mengenai permasalahan tidak tepat sasaran bidikmisi. Prasarvei dilakukan terhadap 30 responden mahasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro dan dihasilkan kesimpulan bahwa mayoritas 67% responden menjawab ada permasalahan ketidaksesuaian antara ketentuan yang berlaku dan penerima bidikmisi. Melihat dari tujuan utama program Bidikmisi maka perlu adanya evaluasi untuk mengukur manfaat program Bidikmisi bagi penerima Bidikmisi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat mekanisme penyaluran dana program Bidikmisi, kesesuaian program Bidikmisi dengan penerima manfaat serta distribusi manfaat beasiswa Bidikmisi di Universitas Diponegoro.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengeluaran Pemerintah

Mangkoesoebroto (1993) menyebutkan pengeluaran pemerintah ada beberapa model yang dikembangkan oleh para ahli ekonomi seperti, model pembangunan tentang perkembangan pemerintah. Model ini dikembangkan oleh Rostow dan Musgrave yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi yang dibedakan antara tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana, seperti misalnya pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Pada tahap menengah peranan investasi pemerintah masih dibutuhkan, namun investasi swasta semakin besar. Peran swasta yang semakin besar ini menyebabkan kegagalan pasar juga semakin besar yang pada akhirnya membuat pemerintah harus menyediakan barang dan jasa publik lebih banyak dan lebih baik.

Pengeluaran Pemerintah dalam Pendidikan

Mongan (2019) menyatakan pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan merupakan pengeluaran pemerintah yang sangat mendasar dalam pembangunan manusia. Pendidikan merupakan bagian penting dalam pencapaian kapabilitas manusia, yang juga bersifat esensial bagi kehidupan masyarakat. Pendidikan mempunyai peranan penting dalam rangka meningkatkan kemampuan suatu negara dalam menyerap teknologi modern, khususnya negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan penting dalam mengembangkan kapasitas dalam rangka mewujudkan pertumbuhan dan pembangunan yang berkesinambungan (*sustainable growth*). Pengeluaran pemerintah dalam sector pendidikan akan berpengaruh terhadap perkembangan pada sector pendidikan tinggi yaitu dengan meningkatnya jumlah mahasiswa yang berhasil menyelesaikan kuliahnya. Semakin tinggi rata-rata tingkat pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat, maka semakin mudah bagi setiap individu pada usia bekerja untuk mengerti, menerapkan dan mendapatkan hasil dari kemajuan teknologi dan akhirnya meningkatkan standar ekonomi dan hidup bangsa. Menurut Meier (dalam Winarti, 2014) Suatu bangsa harus meningkatkan investasi bidang pendidikan dan kesehatan guna mencapai pembangunan.

Pendidikan sebagai Barang Publik

Menurut Hyman (2011) Pendidikan memiliki sifat barang publik dan sifat barang swasta. Karena pendidikan dapat disediakan oleh pemerintah dan pasar. Jika pendidikan

disediakan oleh pemerintah, maka pemerintah harus memikirkan bagaimana agar mereka tetap menyediakan pendidikan sebagai barang publik. Pendidikan juga dapat disediakan secara pribadi seperti barang swasta. Pendidikan dipercaya dapat memberikan manfaat eksternal jika diberikan secara luas pada tingkat tertentu untuk semua anak dalam masyarakat. Pendidikan dasar dan menengah secara keseluruhan wajib sampai usia tertentu, misal di Indonesia wajib belajar 12 tahun. Sehingga pemerintah ikut campur tangan dalam penyediaan layanan ini agar tercapai setidaknya sampai batas minimal pendidikan itu wajib dilaksanakan.

Teori Subsidi

Subsidi merupakan kebalikan atau lawan dari pajak, oleh karena itu ia sering juga disebut pajak negatif. Seiring dengan itu, pengaruhnya terhadap keseimbangan pasar berbalikan dengan pengaruh pajak. Subsidi yang diberikan atas produksi/ penjualan sesuatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut menjadi lebih rendah. Dengan adanya subsidi, biaya produksi suatu barang atau jasa menjadi lebih rendah sehingga produsen bersedia menjual produknya lebih murah. Menurut Nota Keuangan dan RAPBN 2014, subsidi adalah salah satu mekanisme dalam RAPBN 2014 yang digunakan untuk melaksanakan fungsi distribusi. Penerapan fungsi distribusi Pemerintah dalam RAPBN 2014 dijalankan dalam kaitannya dengan upaya pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, subsidi yang dibayarkan oleh Pemerintah dalam membuat suatu barang/jasa menjadi lebih murah untuk dibeli, digunakan, atau dihasilkan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Teori Pembagian Manfaat (*Benefit Incidence*)

Benefit Incidence Analysis adalah metode yang sederhana dan praktis untuk memperkirakan dampak dari subsidi yang dikeluarkan pemerintah di berbagai kelompok demografis dan social ekonomi. Analisis ini melibatkan pengalokasian biaya unit atau biaya yang dikeluarkan untuk subsidi sesuai dengan pemanfaatan yang dinikmati individu dari subsidi tersebut. Di penelitian sebelumnya *Benefit Incidence Analysis* pada pengeluaran publik untuk pendidikan di Filipina yang dilakukan oleh Rosario et al. (2008) mengungkapkan bahwa daerah perkotaan biasanya menarik subsidi yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah pedesaan.

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Penelitian ini menggunakan tiga variabel utama, yaitu pengeluaran pemerintah atas subsidi pendidikan, pengeluaran rumah tangga atas pendidikan, dan pendapatan rumah tangga. Berikut adalah variabel penelitian dan definisi operasional dalam penelitian ini:

1. Pengeluaran Pemerintah atas subsidi pendidikan adalah besarnya jumlah pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan bagi masyarakat. Pengeluaran pemerintah pada subsidi sektor pendidikan dapat dilihat dari jumlah pengeluaran untuk dana subsidi Bidikmisi yang digunakan Kemenristekdikti untuk tahun 2017-2019. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).
2. Pengeluaran Rumah Tangga adalah jumlah pengeluaran orang tua mahasiswa yang menjadi responden untuk setiap bulannya setelah adanya bantuan Bidikmisi. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).
3. Pendapatan Rumah tangga adalah total pendapatan rata-rata tiap penerima bantuan Bidikmisi yang menjadi responden untuk setiap bulannya. Variabel tersebut dihitung dalam satuan Rupiah (Rp).

Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini mahasiswa penerima program Bidikmisi di Universitas Diponegoro mulai angkatan 2017 – 2019 dengan jumlah keseluruhan adalah 3486 mahasiswa.

Penentuan jumlah sampel dihitung dengan rumus Slovin dengan estimasi error sebesar 10% sehingga dapat diketahui jumlah sampel yang diambil adalah 97 mahasiswa penerima Bidikmisi. Kemudian pengambilan sampel didistribusikan ke 3 angkatan yaitu 2017, 2018, dan 2019 dengan cara penarikan sampel pada subpopulasi dilakukan secara *Proportionate Stratified Random Sampling*. Pembagian proporsi sampel yaitu diambil 37 mahasiswa Bidikmisi dari angkatan 2017, 29 mahasiswa Bidikmisi dari angkatan 2018, dan 31 mahasiswa Bidikmisi dari angkatan 2019.

Jenis dan Sumber Data

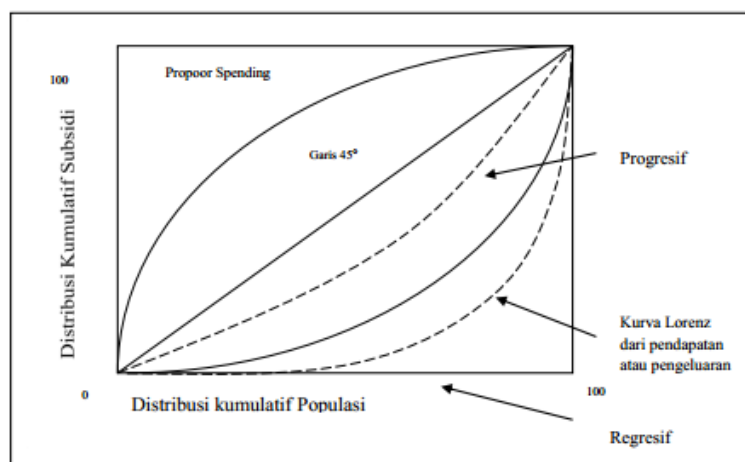
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari angket (kuesioner) yang diisi oleh responden, yaitu penerima Bidikmisi yang menerima manfaat program Bidikmisi secara gratis di Universitas Diponegoro yang terpilih sebagai sampel. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari data-data terkait dengan Program Bidikmisi dari Kemenristekdikti dan Universitas Diponegoro.

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan dua jenis analisis yaitu analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif menggunakan metode deskriptif yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara dengan BAK Universitas Diponegoro, Kamadiksi, serta mahasiswa bidikmisi yang dibutuhkan untuk menjelaskan mekanisme penerimaan dan penyaluran dana program Bidikmisi, kesesuaian penerima bidikmisi dengan penerima manfaat. Analisis kuantitatif menggunakan model *Benefit Incidence Analysis (BIA)* yang dibutuhkan untuk menjelaskan seberapa besar manfaat bidikmisi bagi penerimanya, mengetahui apakah program bidikmisi adalah kebijakan yang progresif serta penargetan program bidikmisi.

Benefit Incidence Analysis adalah alat analisis yang digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam hal subsidi untuk barang publik dan menilai dampak atau manfaat yang diberikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam BIA, analisis terhadap distribusi dari subsidi pemerintah tersebut dilakukan dalam grup-grup yang berbeda dalam masyarakat, dalam hal ini adalah perbedaan dalam total pendapatan rumah tangga.

Gambar 1
Kurva Lorenz dan Kurva Konsentrasi



Sumber : Rosario et al. (1998)

Menurut Rosario et al. 1998) Progresivitas suatu belanja publik dapat terlihat dari kurva Lorenz, yaitu dengan membandingkan kurva konsentrasi manfaat dengan garis diagonal 45

derajat. Garis diagonal 45 derajat mencerminkan kesetaraan yang sempurna dalam pembagian manfaat subsidi bagi masyarakat. Apabila kurva konsentrasi manfaat terletak di atas garis diagonal 45 derajat maka 10 persen penduduk termiskin dalam populasi menerima lebih dari 10 persen manfaat subsidi sehingga distribusi manfaat dikatakan bersifat progresif secara absolut.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mekanisme penyaluran dana bidikmisi di Universitas Diponegoro dimulai dari proses penerimaan mahasiswa bidikmisi. Proses penerimaan mahasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro dimulai dengan pendaftaran ke BAK Universitas Diponegoro, lalu calon penerima akan diminta untuk melengkapi berkas persyaratan. Setelah berkas dikumpulkan ke BAK Universitas Diponegoro, tahap berikutnya adalah verifikasi data. Verifikasi data berupa wawancara dan survei tempat tinggal, namun tidak semua tempat tinggal calon penerima bidikmisi terjangkau untuk disurvei. Berdasarkan data penelitian, sebanyak 87.6% mahasiswa telah disurvei, sedangkan 12.4% mahasiswa tidak disurvei. Mahasiswa yang wilayah tempat tinggalnya tidak terjangkau untuk disurvei berasal dari luar provinsi Jawa Tengah, yaitu D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bengkulu, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Namun terdapat juga mahasiswa yang berasal dari kota Semarang namun tidak disurvei. Universitas Diponegoro menerjunkan surveyor untuk verifikasi, satu tim terdiri dari 3-4 orang, mereka melakukan survei mulai dari tempat tinggal, wawancara dengan masyarakat sekitar serta RT/RW mengenai keadaan sebenarnya calon penerima.

Berdasarkan wawancara dengan tim surveyor, tidak semua calon penerima dapat disurvei, wilayah luar pulau jawa tidak terjangkau untuk disurvei karena kurangnya SDM serta tidak adanya tim surveyor yang berasal dari luar pulau jawa. Terdapat beberapa kendala dalam melakukan survei ini seperti kurangnya sumber daya manusia dari tim surveyor, kurang telitnya tim surveyor saat melakukan pengecekan langsung, dan sulitnya menjangkau rumah calon penerima. Hal-hal tersebut dapat menjadi celah untuk mahasiswa yang seharusnya tidak mendapatkan bidikmisi tetapi mendapatkan bidikmisi dan menyebabkan kurang tepat sasaran nya beasiswa Bidikmisi.

Mekanisme penyaluran yang ada di Universitas Diponegoro dari segi manfaat yang dirasakan oleh penerima bidikmisi dinilai kurang, karena terdapat celah dalam proses penerimaan mahasiswa bidikmisi. Banyak mahasiswa yang menyatakan bahwa di lingkungan sekitar mereka terdapat beberapa mahasiswa yang dipandang mempunyai latar belakang ekonomi tidak mampu dan memiliki potensi akademik namun tidak mendapat beasiswa bidikmisi, serta adanya permasalahan kurang tepat sasaran nya beasiswa Bidikmisi ini sehingga menyebabkan berkurangnya manfaat yang seharusnya dapat diterima oleh masyarakat tidak mampu.

Analisis kesesuaian Program Bidikmisi dengan penerima manfaat diperlukan guna mengetahui implementasi program Bidikmisi di Universitas Diponegoro. Kesesuaian program dengan manfaat ialah ukuran keberhasilan dari sebuah program jika terdapat kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (Korten & Syahrir, 1988). Universitas sebagai penyelenggara program bidikmisi dinilai sudah sesuai dalam memberikan kewajiban penerima bidikmisi kepada mahasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro.

Biaya pendaftaran perguruan tinggi melalui SBMPTN maupun Ujian Mandiri dibebaskan oleh program Bidikmisi, untuk mahasiswa Bidikmisi yang masuk melalui jalur UM akan mendapatkan pembebasan biaya sumbangan pembiayaan institusi (SPI) di Universitas Diponegoro. Sesuai yang diungkapkan Ketua Kamadiksi 2019, bahwa biaya pendaftaran SBMPTN dan UM digratiskan, hal ini sangat membantu karena biaya dapat digunakan untuk keperluan setelah masuk kuliah.

Bantuan biaya penyelenggaraan dalam hal ini adalah bantuan biaya uang kuliah tunggal (UKT). Berdasarkan wawancara dengan Petugas Harian BAK Universitas Diponegoro, bantuan biaya UKT akan langsung disalurkan ke Universitas sehingga mahasiswa tidak perlu membayar UKT disetiap semesternya, namun terdapat batasan pembebasan UKT bagi mahasiswa bidikmisi yaitu delapan semester untuk S1 dan enam semester untuk Sekolah Vokasi. Bantuan biaya hidup mahasiswa Bidikmisi diberikan melalui rekening mahasiswa masing-masing. Bantuan yang diberikan sebanyak Rp 4.200.000,00 setiap semesternya, bantuan biaya hidup diberikan sesuai dengan periode yang telah ditetapkan yaitu untuk semester gasal pada bulan September-Desember, sedangkan untuk semester genap pada bulan Maret- Juni.

Biaya pengelolaan yang diberikan ke Universitas Diponegoro digunakan untuk melaksanakan mandat dari Kemenristekdikti. Biaya pengelolaan ini digunakan oleh pihak universitas untuk membiayai kegiatan pembinaan seperti pelatihan, leadership, pelatihan *TOEFL* dan bimbingan karir. Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan pegawai harian Biro Administrasi Kemahasiswaan (BAK) Universitas Diponegoro bahwa biaya pengelolaan ini digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat bagi penerima Bidikmisi, mulai dari kegiatan peningkatan *softskill*, *TOEFL*, pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keaktifan dari anak-anak bidikmisi. Universitas sebagai penyelenggara program bidikmisi dinilai sudah sesuai dalam memberikan kewajiban penerima bidikmisi kepada mahasiswa bidikmisi di Universitas Diponegoro.

Analisis pembagian manfaat program Bidikmisi adalah gambaran umum tentang distribusi program Bidikmisi dapat tersalurkan dengan tepat atau tidak hal ini berkaitan dengan penargetan dan progresivitas. Hal ini dapat dilihat sehubungan dengan persepsi responden terhadap program Bidikmisi selama ini. Ketepatan program Bidikmisi diukur menggunakan pendekatan *Benefit Incidence Analysis (BIA)*.

Persebaran jawaban responden menurut persepsi terhadap kemanfaatan Bidikmisi merupakan penilaian responden terhadap manfaat bantuan biaya pendidikan berupa UKT dan bantuan biaya hidup dari Bidikmisi selama ini. Sebanyak 86% responden menilai Bidikmisi sangat bermanfaat dan sangat membantu, mereka menilai dengan adanya dana bantuan bidikmisi mereka dapat melanjutkan pendidikan dan terkadang membantu ekonomi keluarga karena tanpa meminta uang saku dari orang tua dan tidak menambah beban biaya hidup orang tua.

Tabel 1
Persebaran Jawaban Responden Menurut Persepsi Terhadap Kemanfaatan Bidikmisi

Persepsi	Jumlah Responden	%
Sangat Bermanfaat/ sangat membantu	83	86
Bermanfaat/ membantu	12	12
Cukup	2	2
Tidak bermanfaat/ tidak membantu	0	0
Sangat tidak bermanfaat/ sangat tidak membantu	0	0
Total	97	100

Sumber : Data primer diolah, 2021

Estimasi pembagian manfaat menjelaskan bagaimana hasil penyaluran Bidikmisi di Universitas Diponegoro dengan menggunakan metode Analisis Pembagian Manfaat. Pembagian sampel dibagi menjadi 5 grup (*quintile*) berdasarkan tingkat pendapatan masing-masing orangtua yang menjadi sampel. Pembagian sampel digunakan untuk

melihat kelompok pendapatan berapa yang paling banyak menerima manfaat dari Bidikmisi

Proporsi pembagian manfaat yang diterima oleh kelompok pendapatan rendah (tergolong miskin) yaitu sebanyak 33% responden. Sedangkan untuk kelompok pendapatan menengah kebawah 37% responden. Hal ini menunjukkan bahwa pembagian manfaat program Bidikmisi sudah tepat sasaran, karena sebagian besar responden yang menerima manfaat Bidikmisi adalah masyarakat miskin dan menengah kebawah. Sisanya sebesar 30% responden dari kelompok pendapatan menengah, menengah keatas dan kaya menerima manfaat dari program Bidikmisi.

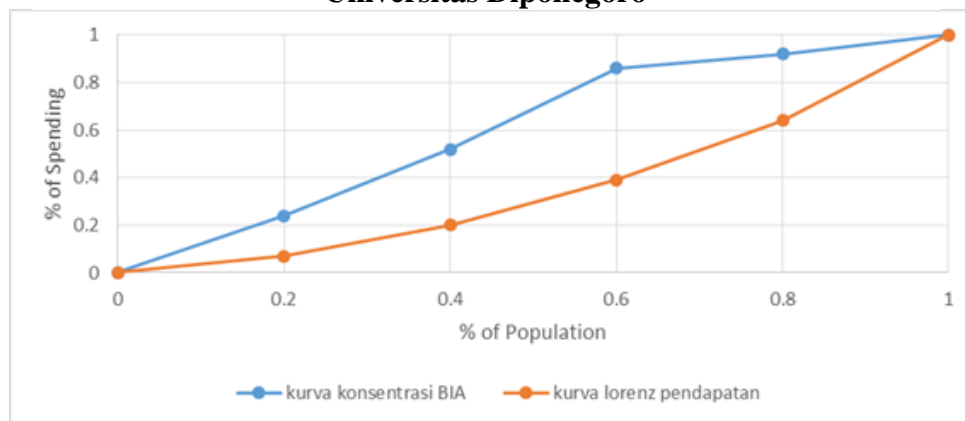
Tabel 2 Tingkat Pendapatan (per bulan)

Quantile	Tingkat Pendapatan	Benefit Incidence (%)
1	<Rp1.000.000,00	24
2	Rp1.000.001,00 – Rp2.000.000,00	28
3	Rp2.000.001,00 – Rp3.000.000,00	34
4	Rp3.000.001,00 – Rp4.000.000,00	6
5	>Rp4.000.000,00	8
Total		100

Sumber : Data promer diolah, 2021

Kurva konsentrasi pada gambar 2 menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah untuk program Bidikmisi banyak dimanfaatkan oleh kuantil 1 dan 2, jika kuantil ini semakin banyak maka semakin banyak juga yang diuntungkan. Peningkatan perolehan manfaat tergantung pada komposisi pengguna program Bidikmisi yang ditentukan oleh tingkat pendapatan, pengeluaran dan komposisi pengeluaran pemerintah. Kurva konsentrasi untuk manfaat dari program Bidikmisi mengkategorikan proporsi kumulatif pendapatan orang tua penerima Bidikmisi yang diurutkan dari pendapatan terendah hingga tertinggi.

Gambar 2
Benefit Incidence Program Bidikmisi pada Perguruan Tinggi di Universitas Diponegoro



Sumber : Data primer diolah, 2021

Konsep progresivitas dalam BIA ditunjukkan dari kurva konsentrasi yang berada diatas garis 45 derajat. Hal ini memperlihatkan bahwa kelompok pendapatan kuantil 1 dan 2 mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengeluaran pemerintah daripada pendapatan atau konsumsi mereka. Dapat dilihat dari gambar 4.3 subsidi pemerintah dalam bentuk program Bidikmisi bersifat progresif secara absolut.

Kelompok berpendapatan rendah mendapatkan manfaat yang proporsional dan tepat sasaran, namun perlu diingat meningkatkan porsi pengeluaran yang proposional bukan berarti semakin baik penargetannya. Aspek BIA inilah yang memberikan alasan dibalik

rekomendasi kebijakan pemerintah secara luas, bahwa secara umum pemerintah harus mulai memperhatikan pendidikan tinggi agar Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tinggi semakin meningkat.

Berdasarkan analisis dari hasil penelitian yang secara empiris dilakukan pada mahasiswa penerima Bidikmisi, Bidikmisi mampu memberikan kontribusi secara signifikan dalam mengurangi/ meringankan beban pengeluaran keluarga, baik pengeluaran total, maupun pengeluaran untuk pendidikan. Bidikmisi juga membantu keluarga mahasiswa dalam meningkatkan taraf hidup dalam bidang pendidikan karena walaupun dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi mereka dapat melanjutkan pendidikan hingga Perguruan Tinggi. Pendapatan yang diterima oleh sebagian besar orangtua responden hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar, sehingga apabila ada pengeluaran tidak terduga, mereka akan menutup pengeluaran tersebut dengan menjual aset, dan utang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada mahasiswa penerima Bidikmisi di Perguruan Tinggi Universitas Diponegoro, maka ditemukan beberapa kesimpulan. Mekanisme penyaluran dana Bidikmisi di Universitas Diponegoro sudah sesuai dengan pedoman yang ada, namun dari segi manfaat yang dirasakan oleh penerima bidikmisi dinilai kurang, karena terdapat ketidaksesuaian dalam proses penerimaan mahasiswa bidikmisi.

Kesesuaian program Bidikmisi dengan penerima Bidikmisi dilihat dari bagaimana kesesuaian yang ditawarkan dengan yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran secara keseluruhan program Bidikmisi sudah menawarkan bantuan sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran. Universitas Diponegoro telah memberikan apa yang ditawarkan oleh Program Bidikmisi kepada Penerima Bidikmisi dengan baik.

Program Bidikmisi di Universitas Diponegoro merupakan kebijakan yang progresif. Mahasiswa dengan keluarga miskin yang menerima manfaat dari program Bidikmisi sebesar 70%. Kebijakan ini dapat dikatakan progresif karena masyarakat dari golongan menengah kebawah dominan lebih banyak menerima pembagian manfaat yaitu sebesar 70% daripada manfaat golongan menengah keatas yaitu 30%. Hal tersebut menyebabkan *Concentration curve* berada diatas garis *perfect equality* sehingga program Bidikmisi dapat dikatakan progresif. Program bidikmisi dinilai sudah membantu keluarga mahasiswa dalam meningkatkan taraf hidup pendidikan, mereka sangat terbantu dengan adanya bantuan pembiayaan UKT dan bantuan hidup yang cukup membantu serta menjadi solusi keuangan pada masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa saran yang dapat diberikan. Pertama, Pada pelaksanaan program Bidikmisi, perlu adanya peningkatan dalam proses verifikasi penerimaan bidikmisi. Jika tempat tinggal calon penerima tidak dapat terjangkau oleh tim surveyor dapat dilakukan panggilan video dengan menunjukkan kondisi rumah. Pada program pelatihan perlu adanya kejelasan mengenai program bimbingan karir karena hal itu akan sangat membantu mahasiswa nantinya.

Kedua, Untuk penelitian selanjutnya dengan tema sejenis, perlu adanya perluasan studi kasus sehingga dapat memberikan gambaran lebih mengenai pembagian manfaat dari subsidi pemerintah secara menyeluruh.

REFERENSI

Badan Pusat Statistik, 2020, *Indeks Pembangunan Manusia 2020*, Jakarta

Chakraborty, P., Chakraborty, L., & Mukherjee, A. (2016). Social sector in a decentralized economy: India in the era of globalization. *Social Sector in a Decentralized Economy*:

- India in the Era of Globalization*, 1–204. <https://doi.org/10.1017/9781316258071>
- Dajan, A. (1989). *Pengantar metode statistik, Volume 1*. LP3ES.
- Davoodi, H. R., Tiongson, E. R., & Asawanuchit, S. S. (2003). *How Useful Are Benefit Incidence Analyses of Publik Education and Health Spending?* <http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2003/wp03227.pdf>
- Demery, L. (2000). *Benefit incidence : a practitioner ' s guide*. World Bank, Poverty and Social Development Group.
- Dumairy. (1996). *Perekonomian Indonesia*. Erlangga.
- Filmer, D., Hammer, J., & Pritchett, L. (1998). *Health policy in poor countries: weak links in the chain* (Issue 1874). <https://econpapers.repec.org/RePEc:wbk:wbrwps:1874>
- Gruber, J. (2016). *Publik Finance and Publik Policy* (Fifth Edit). Worth Publishers.
- Hadi, S. (1994). *Statistik dalam Basic Jilid IV*. Andi Offset.
- Hafidh, A. A., Nurseto, T., & Ngadiyono. (2014). *Benefit Incidence Analysis Program Bidikmisi pada Perguruan Tinggi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Hyman, D. N. (2011). *Publik Finance : A Contemporary Application of Theory to Policy* (10th ed.). South-Western Cengage Learning.
- Kemenristekdikti. (2018). *Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Belmawa*. Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.
- Korten, D. C., & Syahrir, C. (1988). *Pembangunan Berdimensi Kerakyatan*. In *Jakarta: Yayasan Obor Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia.
- Mangkoesebroto, G. (1993). *Ekonomi Publik* (3rd ed.). BPFE Yogyakarta.
- Mongan, J. J. S. (2019). Pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. *Indonesian Treasury Review Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara Dan Kebijakan Publik*, 4(2), 163–176. <https://doi.org/10.33105/itrev.v4i2.122>
- Musgrave, R. ., & Musgrave, P. . (1993). *Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek*. Erlangga.
- Oebaidillah, S. (2019, January 14). Tahun Depan, Beasiswa Bidikmisi Ditambah 44%. *Media Indonesia*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/210431/tahun-depan-beasiswa-bidikmisi-ditambah-44>
- Pardede, R. H. (2015). *Evaluasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi di Universitas Riau Tahun 2010-2014*.
- Rosario, G., Janet, S., & Eden, C. (1998). *Benefit Incidence of Publik Spending on Education in the Philippines*.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (1994). *Makro Ekonomi : Edisi Keempat belas* (14th

ed.). Erlangga.

Sangsaka, S. (2018). *Evaluasi Program Bidikmisi di Universitas Padjadjaran*. Universitas Padjadjaran.

Stiglitz, J. E. (1999). *Economics of the publik sector* (3rd ed.). W. W. Norton & Company, Inc.

Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Suparmoko. (1996). *Ekonomika Pembangunan*. BPFE Yogyakarta.

Supranto, J. (2000). *6, Statistik Teori dan Aplikasi. Jilid 1 Edisi*. Erlangga.

Todaro, M. P., & Boerhan. (1993). *Pembangunan ekonomi di dunia ketiga / Michael P. Todaro; alih bahasa, Burhanuddin Abdullah*. Erlangga.

Winarti, A. (2014). *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Bidang Pendidikan, Kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012* [Universitas Diponegoro]. <http://eprints.undip.ac.id/45363/>

Yusuf, I. M., & Roziqin, A. (2018). Implementasi Kebijakan Beasiswa Bidikmisi: Studi Kasus di Universitas Diponegoro (2018). *Journal of Publik Policy and Management Review, Vol.7 No.2*. <https://doi.org/doi.org/10.31314/pjia.8.2.110-122.2019>